

29.427 WARGA SALATIGA MASIH NUNGGAK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN-PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), NILAINYA TEMBUS 2,276 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://ddtc-cdn1.sgp1.digitaloceanspaces.com/view/ada-29000-wp-masih-menunggak-pajak-pemkot-keluarkan-imbauan-ini-240219082709.webp>

Isi Berita:

SALATIGA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Tercatat untuk periode tahun 2023 masih ada 29.427 wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Kami terus mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Pendapatan pemerintah dari sektor pajak digunakan untuk membangun daerah guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat”, kata Pejabat Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, pada Jumat, 16 Februari 2024.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga mencatat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 hingga akhir Desember lalu tembus Rp10,456 miliar. Sedangkan potensi PBB-P2 tahun tersebut mencapai Rp12.732.203.559 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 78.283.

Dengan demikian masih ada tunggakan senilai Rp2.276.203.559. Adapun jumlah wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 pada tahun 2023 sebanyak 29.427.

Kepala BPKPD Kota Salatiga, Adhi Isnanto, mengatakan meski masih ada 29.427 wajib pajak yang belum membayar PBB-P2, namun realisasi penerimaannya melebihi target yang ditetapkan pada 2023.

“Target 2023 sebesar Rp10.250.000.000. Sedangkan total penerimaan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp10.456.000.000. Jadi realisasi serapannya melebihi target yang ditetapkan”, terangnya.

Disinggung tunggakan PBB-P2 yang nilainya cukup banyak, Adhi mengatakan, pihak akan melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya. Langkah ini dilakukan agar penerimaan PBB-P2 bisa optimal. **(Lingkar Network | Angga Rosa – Lingarjateng.id)**

Sumber Berita:

1. <https://lingkarjateng.id/salatiga-hari-ini/29-427-warga-salatiga-masih-nunggak-pajak-pbb-p2-nilainya-tembus-2276-m/>, “29.427 Warga Salatiga Masih Nunggak Pajak PBB-P2, Nilainya Tembus 2,276 M”, tanggal 17 Februari 2024.
2. <https://news.ddtc.co.id/ada-29000-wp-masih-menunggak-pajak-pemkot-keluarkan-imbauan-ini-1800663>, “Ada 29.000 WP Masih Menunggak Pajak, Pemkot Keluarkan Imbauan Ini”, tanggal 19 Februari 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)